

SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING DI
DESA TONASA, KABUPATEN TAKALAR

A.M RAFI ZHAFRAN FADLI

E011191012



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

A.M.Rafi Zhafran Fadli (E011191012). Partisipasi Masyarakat Dalam Penurunan Stunting di Desa Tonasa Kabupaten Takalar: 100 Halaman + 5 Tabel + 9 Gambar + Lampiran, Dibimbing oleh Adnan Nasution. S.Sos., M.Si. dan Andi Ahmad yani S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc

salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud dari pemerintahan demokratis dimana masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk ikut merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam penurunan *stunting* di Desa Tonasa Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan di kantor Desa Tonasa. Penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Fung (2006) yaitu *participant selection, community and decision*, dan *authority and power*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penurunan stunting di desa Tonasa kabupaten Takalar dilakukan yang diukur menggunakan 3 indikator partisipasi masyarakat menurut Fung (2006) yaitu *participant selection, communication and decision*, dan *authority and power*. Tingkat partisipasi pada *participant selection* dalam perencanaan berada pada level *professional stakeholders* sedangkan dalam tahap pelaksanaan berada pada level *open targeted recruitment*. Kemudian, dalam indikator *communication and decision*, tingkat partisipasi pada tahap perencanaan terdapat pada *express preferences*, kemudian dalam tahap pelaksanaan level partisipasi berada pada *listen as spectator*. Kemudian dalam indikator *authority and power* tingkat partisipasi berada pada level *advice and consult*. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan tingkat partisipasi berada pada level *listen as spectator*.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Penurunan *Stunting*.



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

A.M.Rafi Zhafran Fadli (E011191012). Community Participation in Stunting Reduction in Tonasa Village, Takalar Regency: 100 Pages + 5 Tables + 9 Images + Appendix, Guided by Adnan Nasution. S.Sos., M.Si. and Andi Ahmad yani S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc

One of the principles that must be implemented is to involve community participation in every administration of government and development. Community involvement is a form of democratic government where the community is given ample opportunities to participate in planning development in accordance with the needs desired by the community.

This study aims to describe how community participation in reducing stunting in Tonasa Village, Takalar Regency. The method used in this study uses a qualitative approach that is descriptive through the acquisition of primary data sourced from interviews and observations. The secondary data was obtained at the Tonasa Village office. This study uses indicators proposed by Fung (2006), namely participant selection, community and decision, and authority and power.

The results showed that the quality of community participation in the implementation of stunting reduction in Tonasa village, Takalar regency was carried out which was measured using 3 indicators of community participation according to Fung (2006), namely participant selection, communication and decision, and authority and power. The level of participation in participant selection in planning is at the level of professional stakeholders while in the implementation stage is at the level of open targeted recruitment. Then, in the communication and decision indicator, the participation level at the planning stage is in express preferences, then in the implementation stage the participation level is in listen as spectator. Then in the authority and power indicator, the participation rate is at the level of advice and consult. While in the implementation stage, the participation rate is at the listen as spectator level.

Keywords: Community Participation and Stunting Reduction.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.M.RAFI ZHAFRAN FADLI

NIM : E011191012

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penurunan Stunting di Desa Tonaša Kabupaten Takalar" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 11 Juli 2023

Yang menyatakan,



A.M.RAFI ZHAFRAN FADLI



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : A.M.Rafi Zhafran Fadli
NIM : E011191012
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENURUNAN STUNTING DI DESA
TONASA KABUPATEN TAKALAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Adnan Nasution, S.Sos., M.Si
NIP 197407 200501 1 001


Andi Ahmad Yani. S.Sos. M.Si.MPA. Msc,
NIP 19761023 200501 1 001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : A.M.Rafi Zhafran Fadli
NIM : E011191012
Program Studi : Ilmu Administasi Publik
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENURUNAN STUNTING DI DESA
TONASA KABUPATEN TAKALAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 juni 2023

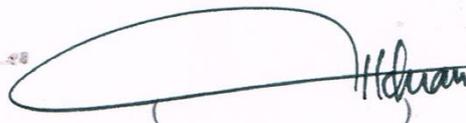
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Adnan Nasution. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Andi Ahmad Yani. S.Sos.M.Si,MPA,M.Sc

Anggota : 1. Dr. Suryadi Lambali, MA

2. Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah dan nikmat Kesehatan serta kesempatan yang telah ia berikan kepada penulis. Shalawat serta Salam penulis haturkan atas junjungan kami Rasulullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan pedoman hidup berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang yang senantiasa *dawam* (konsisten) didalamnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Penurunan Stunting di Desa Tonasa, Kabupaten Takalar”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orangtua penulis, Bapak saya Andi Fadli Fajar S.E. dengan ibu saya Renyta yang telah memberikan support kepada saya untuk dapat menyelesaikan jenjang kuliah di Universitas Hasanuddin. Kemudian terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis atas seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Adnan Nasution S.Sos., M.Si.** selaku Pembimbing I dan bapak **Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.** selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.
6. **Dr. Suryadi Iambali, MA** selaku Penguji I dan Bapak **Rizal Pauzi S.Sos., M.Si.** selaku Penguji II, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Segenap dosen pengajar Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

8. Terima kasih juga kepada seluruh staf Departemen Ilmu Administrasi Publik (**Ibu Rosminah, Bapak Andi Revi, dan Bapak Lili**) juga kepada seluruh staf di lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas berbagai bantuan yang diberikan selama menempuh studi.
9. Terima kasih kepada kakak saya Andi Raniah Khaerunnisa. yang telah membebani saya selama ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN Unhas Gel.108 Desa Tonasa Kabupaten Takalar atas suka maupun duka selama ber-kkn.
11. Terima kasih kepada bapak Syhabuddin selaku kepala Desa Tonasa yang telah memberikan izin untuk dapat melaksanakan penelitian di Desa Tonasa.
12. Terima kasih kepada bapak Junnaedi S.H. selaku sekretaris Desa Tonasa yang telah memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Tonasa.
13. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Desa Tonasa atas bantuannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Teman-teman angkatan Miracle 19, terima kasih atas kebersamaan, serta suka dan duka yang telah mengisi hari-hari penulis selama di kampus.
15. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yaitu Much. Faisal Syahputra S.A.P. Saiful Islam S.A.P., Naylawati Bahtiar S.A.P, dan Tenri Ajeng S.A.P, yang telah memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
16. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas do'a dan dukungan kepada penulis. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan. *Akhirul Qalam*, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 21 Agustus 2023

A.M.RAFI ZHAFRAN FADLI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN ASLI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
II.1 Partisipasi Masyarakat	9
II.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	9
II.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	19
II.2 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	20
II.2.1 Pengertian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	20
II.2.2 Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	21
II.2.3 Pilar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	21
II.3 Stunting.....	22
II.4.1 Pengertian <i>Stunting</i>	22
II.4.2 Faktor Penyebab <i>Stunting</i>	24
II.4.3 Percepatan Penurunan Stunting.....	27
II.4 Desa.....	29
II.4.1 Pengertian Desa	29
II.4.2 Kewenangan, Kewajiban Dan Hak Desa.....	31
II.5 Penelitian Terdahulu	33
II.6 Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
III.1 Pendekatan Penelitian	35

III.2 Lokasi Penelitian	35
III.3 Fokus Penelitian	35
III.4 Unit Analisis	37
III.5 Sumber Data	37
III.6 Informan	37
III.7 Teknik Pengumpulan Data	39
III.8 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	41
IV.1 Gambaran Umum Desa Tonasa	41
IV.1.1 Kondisi Geografis Desa Tonasa	41
IV.1.2 Gambaran Umum Penduduk	46
IV.2. Potensi Sarana dan Prasarana	47
IV.3 Struktur Desa	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
V. Hasil Penelitian	53
V.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Penurunan Stunting di Desa Tonasa	53
V.1.1 Participant Selection	53
V.1.2 Communication and Decision	57
V.1.3 Authority and Power	58
V.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Penurunan Stunting Desa Tonasa	60
V.2.1 Participant Selection	60
V.2.2 Communication and Decision	63
V.2.3 Authority and Power	64
BAB VI	68
PENUTUP	68
VI.1 Kesimpulan	68
VI.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 <i>Design Participatory: Democracy Cube</i> ” Fung (2006), 71.....	13
Gambar 2.1.2 <i>Participant Selection Methods</i> , Fung (2006), 68.....	14
Gambar 2.1.3 <i>Modes of Communication and Decision</i> , Fung (2006), 69.....	16
Gambar 2.1.4 <i>Extent of Authority and Power</i> , Fung (2006),70.....	18
Gambar 2.6.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Potensi Penghasilan Penduduk.....	47
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Tonasa.....	49
Gambar 5.1 Tingkat Kehadiran Pada MUSDES Tonasa Tahun 2022.....	56
Gambar 5.2 Hasil Pengukuran Balita Stunting Tahun 2020-2022.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Gizi Kecamatan Sanrobone Tahun 2020-2022.....	5
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Kondisi Kependudukan Desa Tonasa.....	46
Tabel 4.2 Prasarana Kesehatan.....	48
Tabel 4.3 Forum Kader Desa.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat/publik dalam penyelenggaraan negara jika ditinjau dari perspektif Ilmu Administrasi Publik dapat ditelusuri dari pergeseran dan pemaknaan terhadap paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik. Pergeseran paradigma tersebut diakui, dalam tataran praktis pun, memiliki implikasi nyata terhadap praktik penyelenggaraan administrasi publik untuk mendukung penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam melakukan perubahan guna menjalankan perannya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bagi kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Partisipasi masyarakat ini merupakan bentuk pemerintahan demokratis yang membantu masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya dari sisi perencanaan, pelibatan masyarakat meliputi partisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik, pemanfaatan hasil pembangunan dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dukungan juga diperlukan. Selain partisipasi, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik lainnya seperti transparansi dan akuntabilitas harus dipertimbangkan ketika merumuskan rencana pemerintah.

Partisipasi merupakan suatu keharusan di pihak rakyat karena, dengan tidak adanya partisipasi dari satu kelompok orang, tidak ada kegiatan yang akan dilakukan, terutama ketika datang untuk menyelesaikan masalah terkait pembangunan. Partisipasi juga mendorong sekelompok orang untuk bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah "partisipasi dalam uang, keuletan (gotong royong), dan nubuat" (ide-ide, gagasan). Tanpa partisipasi dari masyarakat umum, pembangunan desa tidak akan berhasil.

Penyelenggaraan pemerintahan partisipatif kini tidak hanya menjadi tuntutan bagi unit pemerintahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah yang partisipatif juga telah menjadi mandat bagi unit pemerintahan terkecil yaitu pada tingkat desa. Konsep desa sebagai sebuah entitas dalam hierarki pemerintahan Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan memiliki kewenangan yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah desa telah memperoleh otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Namun, otonomi yang diperoleh bukan berarti menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lagi terkoneksi dengan unit pemerintahan lainnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah salah satu contoh konkret dari konektivitas antara pemerintah desa dan unit pemerintahan lain khususnya pemerintahan nasional. Pada dasarnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan

komitmen global dan nasional yang dilaksanakan dalam rangka Pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola dalam meningkatkan kualitas hidup satu generasi ke generasi selanjutnya.

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, pembangunan desa diarahkan pada SDGs Desa yang menjadi bentuk pembangunan total dengan berfokus pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. SDGs Desa menjadi upaya katalisator SDGs global dalam konteks desa sehingga memudahkan dalam implementasi di lapangan.

Penetapan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 peraturan presiden tentang percepatan penurunan *stunting* yang berupa pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*. Pilar tersebut meliputi peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan Masyarakat peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pelaksanaan pembangunan total desa dimulai setelah Permendesa PDDT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

ditetapkan. Dengan adanya Permendesa tersebut pemerintah desa dalam pembangunannya dituntut agar fokus terhadap 17 tujuan pembangunan yang salah satunya ialah Desa Tanpa Kelaparan. Kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian SDGs nasional pada tahun 2020 tercatat mencapai angka 74 persen (kominfo.go.id 2020). Capaian tersebut tidak lain disebabkan oleh aspek kewilayahan yang dimana 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Selain itu, aspek kewargaan juga tidak kalah pentingnya karena menurut 43 persen penduduk Indonesia ada di desa (Kemendes PDTT 2021).

Masalah kelaparan dan kesehatan merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Akses informasi dan akses terhadap Kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat kelas bawah mudah mendapatkan terjangkau masalah Kesehatan. Salah satu masalah Kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia adalah *stunting*. Menurut World Health Organization (WHO), dalam jangka pendek, *stunting* dapat menyebabkan peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, tidak optimalnya perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal, serta peningkatan biaya kesehatan. *Stunting* termasuk dalam masalah gizi kronis karena merupakan salah satu kekurangan gizi yang terkait dengan kekurangan gizi sebelumnya. Masalah *Stunting* ini harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah karena apa bila kita melihat dampak jangka panjang dari *stunting* yang menyebabkan pembelajaran dan kinerja di sekolah yang kurang optimal, produktivitas dan kapasitas kerja yang kurang optimal. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang kurang optimal akibat *stunting* pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan di negara-negara.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka *stunting* Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 27,4%. Capaian tersebut masih jauh dari angka *stunting* nasional yang telah ditetapkan yakni 24,4%. (Kementerian Kesehatan RI, 2021) Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dalam menurunkan angka *stunting* menunjukkan hasil yang buruk karena capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yakni 24,59%. Salah satu Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja serupa dalam lingkup Provinsi Sul-sel ialah Kabupaten Takalar (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Penilaian tersebut bukanlah sesuatu yang tidak beralasan karena Kabupaten Takalar menjadi 10 besar dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel yang memiliki angka *stunting* tertinggi. Dalam rilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 menunjukkan posisi Kabupaten Takalar masing-masing berada pada posisi tiga dalam prevalensi balita *stunting* dengan angka 34,7 %, posisi pertama dalam prevalensi balita *wasting* dengan angka 10,7%, dan posisi pertama pada prevalensi balita *underweight* dengan angka 27,4%. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Tabel 1.1 Data Gizi Kecamatan Sanrobone Tahun 2020-2021

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH BALITA DIUKUR	PERSENTASE		
			2020	2021	2022
1	LAGURUDA	190	46	32	32
2	SANROBONE	208	48	35	36
3	BANYUANYARA	279	65	56	43
4	PADDINGING	181	28	24	30
5	UJUNG BAJI	203	36	54	32
6	TONASA	291	72	76	55
Jumlah		1352	295	277	197

Sumber: Puskesmas Kecamatan Sanrobone (2022)

Kabupaten Takalar memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Manggarabombang, Mappakasunggu, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong Selatan, Galesong Utara, Patalassang, Galesong, dan Sanrobone. Salah satu Kecamatan yang menjadi fokus peneliti adalah Kecamatan Sanrobone. Jika kita melihat data puskesmas Kecamatan Sanrobone tahun 2022 maka kita dapat mengetahui bahwa Desa Tonasa yang menjadi bagian dari Kecamatan Sanrobone merupakan desa yang paling banyak memiliki permasalahan *stunting*.

Desa adalah unit terkecil dari negara yang paling dekat dengan rakyat dan sangat peduli dengan kebutuhan mereka. Desa adalah badan hukum masyarakat dengan batas-batas wilayah, kekuasaan, pelayanan pemerintah, hak asal dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia Bersatu (NKRI). Sebagai kepala negara, desa harus melaksanakan proyek konstruksi fisik dan buatan untuk meningkatkan standar hidup mayoritas penduduk desa. Pembangunan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat perdesaan dengan memenuhi kebutuhan pokok, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pedesaan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada peran dan keterlibatan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan masyarakat dalam pencegahan kelaparan adalah partisipasi warga pada posyandu, hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat pernah

juga dibahas oleh Sintiawati et. al, (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu. Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat yang datang untuk mengikuti kegiatan rutin di posyandu.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penurunan *stunting* yang merupakan salah satu indikator dari SDGs, yang dimana dalam SDGs agenda tanpa kelaparan ini dirancang untuk dapat mengurangi tingkat balita yang terkena *stunting*.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai **Partisipasi Masyarakat Desa Tonasa Dalam Penurunan Stunting di Desa Tonasa Kabupaten Takalar**. Penulis ingin mengetahui mengenai partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kelaparan di Desa Tonasa terutama dalam penyelesaian permasalahan *stunting* yang terjadi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yaitu bagaimana level partisipasi masyarakat dalam menurunkan *stunting* di Desa Tonasa?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas partisipasi masyarakat dalam menurunkan *stunting* di Desa Tonasa?

I.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka penurunan *stunting* di daerahnya khususnya bagi Pemerintah Kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan akses informasi dalam rangka pembangunan di daerahnya.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian Partisipasi Masyarakat Dalam penurunan *stunting* di Desa Tonasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Partisipasi Masyarakat

II.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat/publik dalam penyelenggaraan negara jika ditinjau dari perspektif Ilmu Administrasi Publik dapat ditelusuri dari pergeseran dan pemaknaan terhadap paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik. Pergeseran paradigma tersebut diakui, dalam tataran praktis pun, memiliki implikasi nyata terhadap praktik penyelenggaraan administrasi publik untuk mendukung penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam melakukan perubahan guna menjalankan perannya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bagi kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga pandangan dalam membedah administrasi publik, yaitu administrasi public lama (old public administration), manajemen publik baru (new public management) dan manajemen pelayanan baru (new public service). Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, (2003). Pandangan mengenai manajemen pelayanan baru (new public service) lebih memposisikan warga negara sebagai obyek utama dalam pemerintahan yang demokrasi. Sehingga warga negara atau masyarakat tidak hanya dipandang hanya secara pribadi tetapi warga negara adalah bahagian dari pemerintah dalam sistem pelayanan publik. Oleh Karena itu dalam new public service (NPS) keterlibatan public bersama pemerintah adalah sebagai suatu proses demokratisasi reformasi pelayanan publik.

Menurut Gaventa & Valderrama (1999), Makna partisipasi telah berubah dari pemahaman mikro tradisional menjadi pemahaman makro. Dari terbatasnya

keterlibatan penerima manfaat program pembangunan hingga keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan. Ini tentang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.

Menurut Pasaribu (1982) yang dikutip oleh Tawai dan Yusuf (2017), partisipasi adalah perhatian dan kontribusi kelompok yang berpartisipasi (dalam hal ini, masyarakat). Untuk mempromosikan dan memobilisasi semangat partisipasi, diperlukan kondisi di mana pekerja sosial dapat bangkit di masyarakat. Pasaribu (1982) dalam Tawai dan Yusuf (2017) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai berikut: (1) Tekad, tanggung jawab, ketergantungan, rasa koneksi yang sama. Jika indera-indera ini hadir dalam masyarakat, tingkat partisipasi yang tinggi dalam masyarakat partisipatif dapat diharapkan. (2) Hubungan dengan tujuan hidup, hubungan dengan emosi Ini saja tidak cukup untuk berpartisipasi. Bukti yang jelas dalam hal ini adalah akurasi, ketekunan, kemauan keras, dan (3) kemampuan beradaptasi untuk mencapai tujuan ketika tujuan jelas. Untuk menciptakan partisipasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan sangat penting, (4) keberadaan inisiator dan keberadaan orang-orang yang membawa perubahan adalah prasyarat untuk kelahiran partisipasi, dan (5) iklim partisipasi menciptakan partisipasi. Jika Anda tidak menciptakan iklim, Anda tidak akan dilahirkan, tetapi jika Anda memiliki iklim, partisipasi akan tumbuh dengan sangat mudah.

Wazir (1999) dalam Hajar et.al (2018) partisipasi dapat diartikan sebagai partisipasi sadar seseorang dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Di sisi lain, dalam Hajar et.al (2018), partisipasi Isbandi (2007) berarti mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat, memilih dan memutuskan solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, serta mengatasi masalah

tersebut. keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan upaya untuk , dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Rydin dan Pennington (2000) menggaris bawahi dua pendekatan berbeda untuk partisipasi masyarakat: yang berfokus pada hak demokratis untuk terlibat dalam proses kebijakan publik, yang berarti bahwa semua hambatan keterlibatan tersebut harus dikurangi atau ditarik, dan yang lain berfokus pada efektivitas penyampaian kebijakan, artinya bahwa partisipasi publik dapat membantu dalam menghasilkan hasil kebijakan yang 'lebih baik'. Pertama pendekatan menekankan pada memungkinkan akses warga ke proses kebijakan, mendorong pemanfaatan akses tersebut dan memastikan bahwa partisipasi tersebut membuat perbedaan hasil kebijakan.

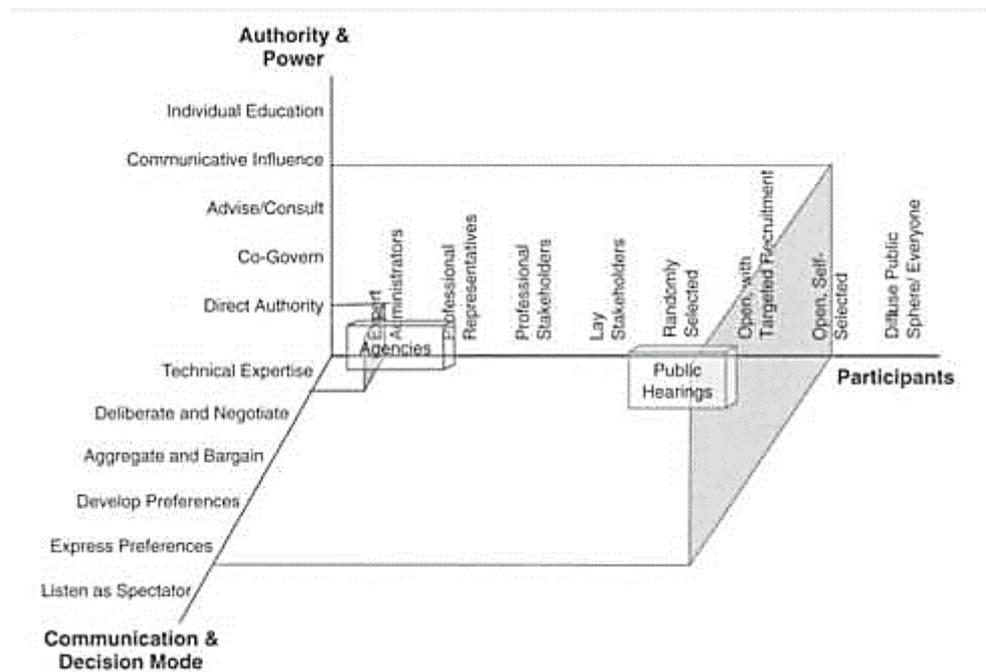
Totok dan Poerwoko (2015:82) partisipasi masyarakat merupakan sebuah kesadaran, minat dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui partisipasi, benar-benar diakui bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya kewajiban yang ditanggung dan dikeluarkan oleh pemerintah (lembaga) itu sendiri, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Isbandi (2007) mengatakan konsep partisipasi juga meliputi partisipasi dalam hak-hak politik, termasuk pengambilan keputusan publik, secara sistematis diimplementasikan sebagai alat untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Fung (2006) berpandangan bahwa pengambilan keputusan pada desain institusi secara umum, misalnya dalam proyek pengembangan perkotaan yang kompleks , seringkali merupakan hasil dari interaksi berbagai 'arena', seperti

perencanaan lembaga, negosiasi pemangku kepentingan, ruang lingkup dewan, dan audiensi publik. Interaksi arena yang dimaksud termasuk adanya bidang-bidang pejabat publik yang beroperasi secara terisolasi dari publik. Ini perlu dijadikan pertimbangan yang penting sebab artinya terdapat arena yang memang beroperasi tanpa adanya input atau partisipasi publik sama sekali. Oleh karena adanya desain institusi yang menghendaki "*Governance Choices*", di mana pemerintah berinteraksi atau tidak berinteraksi dengan berbagai elemen termasuk publik, Fung (2006) lalu mengutarakan adanya tiga pertanyaan penting *siapa yang berpartisipasi? Bagaimana mereka berkomunikasi dan membuat keputusan? Apa hubungan antara kesimpulan dan pendapat mereka dengan implementasi atau kebijakan publik yang dihasilkan?*

Berdasarkan tiga pertanyaan tersebut, Fung (2006) kemudian memperkenalkan teorinya "*Design Participatory: Democracy Cube*". Inti teori ini adalah mengukur tiga dimensi penting untuk memahami potensi dan batas sebuah desain partisipasi, yaitu *participation selection, communication and decision, serta authority and power.*

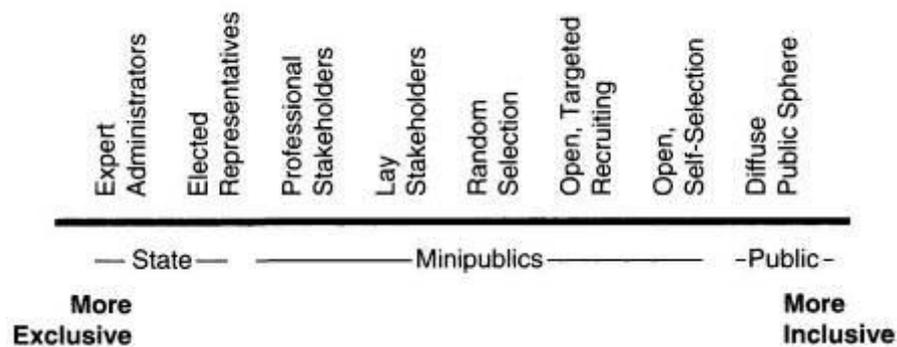


Gambar 2.1.1 “Design Participatory: Democracy Cube” Fung (2006:, 71)

a. Participant selection

Alasan meningkatkan partisipasi publik di setiap bidang adalah karena banyaknya kemungkinan bahwa pejabat atau perwakilan rakyat memiliki banyak kekurangan, seperti kurang pengetahuan, kompetensi, tujuan umum, sumber daya, atau rasa hormat yang diperlukan untuk memerintahkan kepatuhan dan kerjasama. Untuk mengatasi kekurangan itu, dalam partisipasi publik sangatlah penting menentukan siapa yang berpartisipasi (siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan bagaimana seseorang bisa berpartisipasi). Selain itu, apakah mereka secara tepat mewakili populasi yang relevan atau masyarakat umum? Apakah ada kepentingan atau perspektif penting dikecualikan? Apakah mereka memiliki informasi dan kompetensi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik? Apakah mereka yang berpartisipasi responsif dan bertanggung jawab kepada mereka yang tidak berpartisipasi?

Pemilihan partisipan (*participant selection*) oleh Fung disusun dan digambarkan menggunakan skala dari metode yang paling tidak terbatas (*more inclusive*) hingga yang sangat terbatas (*more exclusive*), kemudian dikategorikannya menjadi tiga bagian, yakni publik, mini publik, dan *state*.



Gambar 2.1.2 *Participant Selection Methods*, Fung (2006: 68)

Publik merupakan kategori yang paling inklusif atau tidak terbatas dengan menggunakan mekanisme partisipasi yang sepenuhnya membaur dengan publik (*diffuse public sphere*), seperti media massa, asosiasi-asosiasi sekunder, dan ruang diskusi informal lainnya.

Mini publik merupakan kategori pertengahan yang sengaja mengumpulkan warga dalam badan-badan terpisah untuk mendiskusikan atau memutuskan hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kategori ini terdiri atas lima mekanisme (Fung, 2006), di antaranya:

- a. Terbuka dan dipilih sendiri (*open, self selected*) di mana orang-orang bebas memilih untuk berpartisipasi. Biasanya dalam partisipasi seperti ini, diikuti orang-orang yang mempunyai pendidikan atau ketertarikan lebih pada isu terkait;

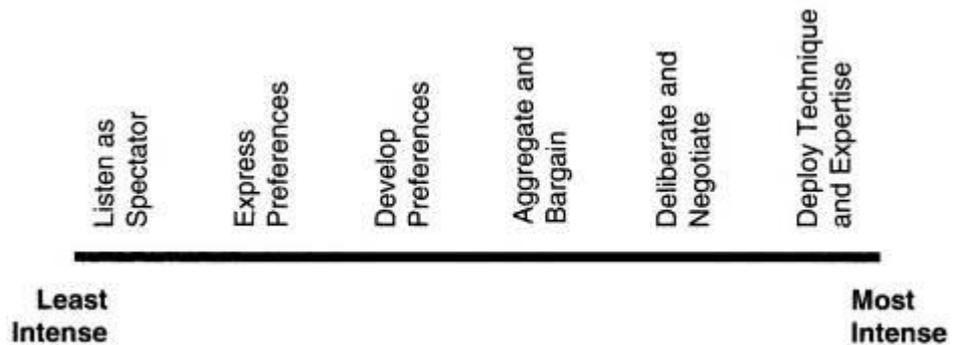
- b. Terbuka dengan perekrutan yang ditargetkan (*open, targeted recruiting*) di mana beberapa kelompok ditargetkan untuk dilibatkan, utamanya mereka yang kemungkinan keterlibatannya rendah;
- c. Pemilihan acak (*random selection*), peserta secara acak dipilih dari populasi umum untuk mendiskusikan isu-isu publik;
- d. Pemangku kepentingan awam (*lay stakeholders*), merupakan warga yang memiliki minat dalam beberapa isu publik, tidak dibayar untuk berpartisipasi, tetapi bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi perwakilan mereka yang memiliki minat sama namun memilih tidak berpartisipasi;
- e. Pemangku kepentingan profesional (*professional stakeholders*), para peserta ini sering kali merupakan perwakilan yang dibayar untuk kepentingan tertentu yang terorganisir.

State merupakan kategori yang paling terbatas atau eksklusif, dimana pemilihan partisipan terbatas pada individu-individu yang menempati posisi di negara. Kategori ini memuat dua mekanisme, yaitu a) Pemilihan kompetitif yang memilih perwakilan dari politisi profesional (*elected representatives*) untuk mewakili kepentingan publik; dan b) Ahli pelayan sipil (*expert administrators*) yang menjadi staf birokrasi publik.

b. *Communication and decision*

Dimensi penting kedua dari desain kelembagaan menentukan bagaimana peserta berinteraksi dalam suatu tempat diskusi atau keputusan publik. Fungsi menggambarkan dimensi ini dalam skala intensitas, mulai dari yang paling tidak

intens sampai yang terintens, di mana intensitas mengindikasikan tingkat investasi, pengetahuan, dan komitmen yang dibutuhkan dari partisipasi.



Gambar 2.1.3 *Modes of Communication and Decision*, Fung (2006: 69)

Dimensi ini menurut Fung (2006) memuat enam mode komunikasi (tiga mode pertama) dan pengambilan keputusan (tiga mode kedua) dalam pengaturan partisipasi di ruang diskusi publik, yakni:

- a) Mendengarkan sebagai penonton (*listen as a spectator*) di mana mayoritas warga sama sekali tidak mengajukan pandangan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berpartisipasi sebagai penonton yang menerima informasi tentang beberapa kebijakan atau proyek, dan mereka menjadi saksi perjuangan di antara politisi, aktivis, dan kelompok kepentingan;
- b) Mengungkapkan preferensi (*express preferences*) di mana diskusi publik menawarkan peluang bagi beberapa orang untuk mengekspresikan preferensi mereka, seperti mengajukan pendapat, saran, atau pertanyaan;

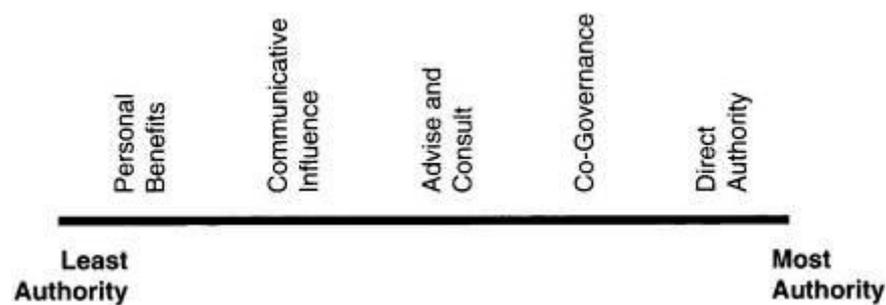
- c) Mengembangkan preferensi (*develop preferences*), di mana diskusi diatur agar memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mungkin mengubah preferensi dan perspektif mereka. Partisipan didorong untuk belajar tentang masalah;
- d) Agregasi dan tawar-menawar (*aggregate and bargain*), di mana partisipan sejak awal mengetahui apa yang mereka inginkan. Cara pengambilan keputusan ini sering dimediasi oleh pengaruh dan kekuatan yang mereka bawa untuk mengomunikasikan preferensi mereka ke dalam pilihan sosial dan untuk memajukan preferensi bersama yang mereka miliki;
- e) Musyawarah dan negosiasi (*deliberate and negotiate*), partisipan sengaja mencari tahu apa mereka inginkan secara individu dan sebagai kelompok, mereka biasanya menyerap materi latar belakang pendidikan dan bertukar perspektif, pengalaman, dan alasan satu sama lain untuk mengembangkan pandangan mereka dan menemukan minat mereka;
- f) Menyebarkan teknik dan keahlian (*deploy technique and expertise*), yaitu pengambilan keputusan melalui keahlian teknis para pejabat yang pelatihan dan spesialisasi profesionalnya sesuai untuk memecahkan masalah tertentu. Modus ini biasanya tidak melibatkan warga. Ini adalah domainnya perencana, regulator, pekerja sosial, guru dan kepala sekolah, polisi, dan sebagainya.

Mekanisme partisipasi yang menggunakan tiga mode pertama komunikasi seringkali tidak berusaha untuk menerjemahkan pandangan atau preferensi partisipan menjadi pandangan kolektif atau keputusan. Fung berpendapat bahwa pada kebanyakan audiensi publik, pejabat

berkomitmen untuk tidak lebih dari sekadar menerima kesaksian peserta dan mempertimbangkan pandangan mereka dalam pertimbangan mereka sendiri selanjutnya. Bagaimanapun, beberapa audiensi publik lainnya mencoba untuk mengembangkan kolaborasi alternatif melalui kombinasi tiga metode pengambilan keputusan.

c. *Authority and power*

Dimensi penting ketiga untuk memahami partisipasi publik, yakni otoritas dan pengaruh. Ini berkaitan dengan dampak partisipasi publik (hubungan antara keterlibatan atau berbagai pendapat partisipan dengan kebijakan yang dihasilkan). Fung lebih lanjut menggambarkan sebuah skala otoritas untuk menentukan sampai di mana sebuah ruang partisipasi itu digunakan, mulai dari otoritas terkuat hingga yang terlemah.



Gambar 2.1.4. *Extent of Authority and Power*, Fung (2006:70)

Dimensi ini menurut Fung (2006) memuat lima kategori, di antaranya:

- a. Keuntungan pribadi (*personal benefit*), di mana ruang partisipasi digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pembangunan atau mungkin

- b. Pengaruh komunikatif (*communicative influence*), di mana ruang partisipasi digunakan untuk memberikan pengaruh pada negara atau agen-agensya secara tidak langsung dengan mengubah atau memobilisasi opini publik. Diskusi untuk memenuhi rasa kewajiban sipil; dan keputusan memberikan pengaruh komunikatif pada anggota publik atau pejabat yang tergerak oleh kesaksian, alasan, kesimpulan, atau kejujuran proses diri;
- c. Nasihat dan konsultasi (*advise and consult*), di mana dalam mode ini, pejabat mempertahankan otoritas dan kekuasaan mereka tetapi tetap menerima masukan dari peserta. Ruang partisipasi di sini kebanyakan bertujuan untuk menerima dan memberikan nasihat;
- d. Pemerintahan bersama (*co-governance*), di mana mekanisme partisipasi menjalankan kekuasaan langsung. Warga yang berpartisipasi bergabung dalam semacam kemitraan pemerintahan bersama dengan pejabat untuk membuat rencana dan kebijakan atau untuk mengembangkan strategi untuk tindakan publik;
- e. Otoritas langsung (*direct authority*), merupakan otoritas terkuat di mana ruang partisipasi publik memberikan kuasa langsung atas keputusan publik atau sumber daya. Sekelompok organisasi dimungkinkan mereka untuk mengontrol, merencanakan, atau proyek pembangunan sublokal.

II.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Solekhan (2014:153) dalam Latif et.al.(2019) mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada intinya ada (empat) macam, yaitu :

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Muarifuddin (2017) Ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem sosial meliputi materi, ide, dan energi. Jelas bahwa keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi, tetapi meluas dari pengambilan keputusan hingga menikmati hasilnya.

II.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

II.2.1 Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan singkatan dari *Sustainable Development Goals* yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). SDGs merupakan kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Tujuannya yang ada didalam SDGs sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing tujuan memiliki target tersendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya ada sebanyak 169. Pengertian dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan 17 Tujuannya. SDGs mencakup berbagai isu penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Dengan adanya kerangka baru yakni SDGs maka kerangka

pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti menjadi SDGs.

II.2.2 Tujuan *Substainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

II.2.3 Pilar *Substainable Development Goals* (SDGs)

a. Pilar Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

b. Pilar pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

c. Pilar pembangunan lingkungan

Pembangunan lingkungan SDGs tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

d. Pilar pembangunan hukum dan tata Kelola

Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

II.3 Stunting

II.4.1 Pengertian *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan kurang gizi yang berlangsung kronis. Keadaan gizi balita pendek menjadi penyebab 2,2 juta dari seluruh penyebab kematian balita di seluruh dunia. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidak seimbangan gizi. *Stunting* masih merupakan satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. *Stunting* akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena *stunting* hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki sehingga

akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan risiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah.

Stunting menurut kepres 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi yang terjadi pada anak-anak berusia dibawah lima tahun (Rahayu, et al., 2018).

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek kerana malnutrisi (Nasikhah and Margawati, 2019). Sedangkan.

Menurut pandangan Aryastami (2017) stunting adalah masalah gizi buruk yang disebabkan oleh multi-faktor dan bersifat lintas generasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia gagal dalam memahami stunting yang menganggap bahwa tumbuh pendek merupakan faktor keturunan semata. Stunting yaitu keadaan kekurangan zat gizi kronis pada manusia karena masalah ketidakcukupan gizi dalam kurun waktu lama yang dipengaruhi oleh kandungan makanan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan minimal kalori, protein dan nutrisi lainnya (Siregar and Siagian, 2021).

Masalah stunting berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia suatu negara yang merupakan asset berharga. Efek negatif yang ditimbulkan berupa rendahnya IQ, lemahnya kognitif, minimnya produktivitas dan

meningkatnya risiko penyakit yang mengakibatkan kerugian dalam kurun waktu yang lama bagi kondisi perekonomian Indonesia (Trihono et al, 2019).

II.4.2 Faktor Penyebab *Stunting*

Menurut Betriana et.al (2020) ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya *stunting* (1) pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua, (2) berat badan lahir rendah (BBLR) dan status gizi, dan (3) status ekonomi keluarga. Faktor-faktor yang muncul ini merupakan analisis dari beberapa penelitian.

Penyebab utama *stunting* diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hami, ibu menyusui dan balita.

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya *stunting*

a) Gizi buruk

Hasil studi terkait *stunting* ditemukan bahwa faktor keturunan akibat *stunting* hanya sebesar 15%, sehingga membuktikan kasus *stunting* yang terjadi bukan semata-mata karena faktor keturunan namun masalah terbesar yang menjadi penyebab dari *stunting* adalah asupan zat gizi yang burukdapat (Sari et al., 2010 and Langley, 2010). Sedangkan menurut Losong and Andriani (2017), *stunting* merupakan dampak akibat ketidakseimbangan dan ketidakcukupan gizi yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan fisik dengan ditandai terjadinya penurunan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. *Stunting* pada anak anak menghambat pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai dengan anak-

anak normal lainnya, yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi saat dalam kandungan, bayi pada seribu hari kehidupan pertama, dan pada usia anak-anak. Kekurangan kalori, protein, vitamin, mineral dan mikronutrien lainnya merupakan permasalahan gizi kronis yang memicu terjadinya stunting.

b) Pola asuh

Kualitas pola asuh secara umum dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang kesehatan dan gizi pada usia pranikah, awal pernikahan, sebelum hamil dan masa kehamilan yang berimbas terhadap rendahnya kepedulian tentang konsumsi makanan yang memiliki kandungan gizi yang tercukupi. Berdasarkan data Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI (2020) bahwa pola asuh yang buruk di Indonesia menyebabkan setidaknya 60% anak usia 0-6 bulan tidak memperoleh ASI eksklusif dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI.

c) Keterbatasan layanan kesehatan

Keterbatasan layanan kesehatan di Indonesia merupakan hambatan dalam menangani penanggulangan penurunan stunting karena persoalan gizi berhubungan secara langsung dengan akses layanan kesehatan. Fungsi layanan kesehatan yang tidak optimal dalam memberikan pemeriksaan, tindakan, konseling dan edukasi menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dari layanan kesehatan tersebut. Kondisi tersebut banyak terjadi di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan ketersediaan akses layanan kesehatan di berbagai daerah nusantara.

d) Akses air bersih dan sanitasi

Kekurangan air bersih dapat memicu peningkatan risiko terjadinya penyakit infeksi yang menyebabkan balita terkena stunting (Kemenkes RI, 2018). Sanitasi yang buruk bukan hanya dapat menyebabkan stunting melainkan juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan, seperti diare dan cacingan. Studi yang dilakukan oleh Angraini *et al.*, (2021) bahwa kekurangan akses air bersih dan sanitasi berisiko tinggi terkena stunting yaitu 65,9%.

e) Tingkat pendidikan rendah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasikhah and Margawati (2019) bahwa tingkat pendidikan ayah merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi pada kasus stunting di Kecamatan Semarang Timur. Sebagian besar anak yang terkena stunting memiliki tingkat pendidikan ayah yang lebih rendah daripada anak-anak normal lainnya (Astari, Nasoetion, and Dwiriani, 2005). Sedangkan, menurut Yim Yimer, G. (2000) pada penelitiannya di Ethiopia ditemukan bahwa pendidikan ibu menjadi variable yang berpengaruh terhadap kejadian malnutrisi kronis yang menyebabkan stunting. Mendukung kedua pernyataan tersebut, penelitian yang dilakukan Semba, et al. (2008) di Indonesia dan Bangladesh, memperlihatkan tingkat pendidikan bapak dan ibu menjadi faktor utama permasalahan stunting pada balita.

Pada konteks masalah kesehatan, tingkat pendidikan seseorang berbading lurus dengan pemahaman seseorang tentang kesehatan dalam mempengaruhi proses penerimaan informasi dan pengetahuan yang akan diimplementasikan pada perilaku dan gaya kehidupan sehari-hari, sehingga semakin rendah tingkat

pendidikan orang tua baik dari bapak dan ibu, maka risiko terkena stunting semakin besar.

f) Kemiskinan

Ketidakmampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas pangan disebabkan oleh kemiskinan yang berlangsung lama. Kemerosotan jumlah mutu pangan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang tidak mampu membeli sumber pangan yang berkualitas tinggi dengan kandungan kalori, protein, vitamin, mineral dan mikronutrien lainnya yang cukup, menyebabkan kekurangan gizi makro ataupun mikro. (Chaudhury, R. H. ,1984). Tingkat kemiskinan dapat dilakukan melalui program perbagikan gizi yang memiliki manfaat jangka panjang seperti, penurunan penyakit, perbaikan produktivitas, dan pengurangan biaya pengobatan yang meringankan sumber anggaran negara (World Bank, 2006).

Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah pulau Jawa dan Bali oleh Kusumawardhani and Martianto (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kemiskinan dan prevalensi gizi buruk, yang bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan pada suatu daerah, semakin tinggi risiko prevalensi gizi buruk pada daerah tersebut. Akar dari permasalahan gizi, baik itu *wasting*, *underweight* dan stunting adalah kemiskinan (Rosha, Hardinsyah and Baliwati, 2012).

II.4.3 Percepatan Penurunan Stunting

Dalam Perpres 72 Tahun 2021 telah diatur strategi nasional percepatan penurunan stunting yang akan menjadi acuan bagi setiap pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*. Dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Seluruh pemerintah daerah maupun desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Sfimting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Sfimting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

II.4.4 Tim percepatan penurunan Stunting

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan di tingkat desa/kelurahan kepala desa diberikan kewenangan untuk menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa. Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Adapun tim percepatan penurunan stunting tingkat desa melibatkan.

- a. Tenaga Kesehatan mencakup bidan.
- b. Penyuluhan keluarga berencana
- c. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK)
- d. Pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD) atau kader Pembangunan manusia (KPM), kader, dan unsur Masyarakat lainnya.

II.4 Desa

II.4.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut kementrian PDDT Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003) dalam Latif et.al. (2019). mengemukakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut Kartohadikoesoemo (1984) dalam Sihombing (2021), desa merupakan sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang dimana kedaulatan rakyat dan berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.

Widjaja (2003:) mengemukakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

Selain itu Widjaja (2003) dalam Mustanir et.al. (2018) juga mengungkapkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian desa mempunyai kewenangan

dalam mengatur kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa akan bertanggung jawab pada BPD serta melaporkan pelaksanaannya pada Bupati.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Desa termasuk komponen pemerintahan yang berstatus di bawah kendali suatu kabupaten atau kota; statusnya berbeda dengan kecamatan yang dibawah pengawasan camat. Kelurahan sendiri ialah area kerja lurah untuk pemerintahan kecamatan, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau menjalankan kepentingan warga lokal.

Pemerintah desa menurut kepres adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

II.4.2 Kewenangan, Kewajiban Dan Hak Desa

Kewenangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Permendagri tersebut menyebutkan bahwa :

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa, kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan daerah di tingkat desa, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lain-lain, Orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, prefektur, prefektur dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Hak dan kewajiban desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dia menjelaskan bahwa :

a. Desa Berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul , adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
2. Menetapkan dan mengelola Kelembagaan Desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

b. Desa Berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

II.4.3 Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

II.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti sebagai sumber literatur dan memberikan pandangan teori terkait penelitian yang dilakukan. Maka dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul penelitian dalam lima tahun terakhir.

Irawan (2019) meneliti tentang model partisipasi masyarakat dalam Program Desa Siaga Aktif di Kabupaten Merauke, Kecamatan Kuliku, Desa Salor Indah. Irawan (2019) membahas peningkatan keterlibatan masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan program desa siaga aktif. Para peneliti mengatakan, dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program Desa Siaga Aktif, masalah kesehatan dapat diatasi dengan lebih cepat.

Sintiawati et.al.,(2021) partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu. Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat yang dating untuk mengikuti kegiatan rutin di posyandu. Penelitian ini menggunakan konsep Daryono (tahun) dalam (Sastropoetro,1988: 21) yang menyebutkan bentuk partisipasi masyarakat terbagi dalam 3 jenis yakni 1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan program 3. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi terhadap program.

Firdaus (2021) meneliti partisipasi masyarakat melalui program gerakan membangun masyarakat sehat pada pelayanan kesehatan di Posyandu (Gerbangmas Siaga) Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pada Gerbangmas Bougenville RW 20 Kelurahan Citrowadingsa, Kabupaten Lumajang). Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program gerbangmas siaga di Kabupaten Lumajang, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

II.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan Pustaka maka peneliti merancang kerangka pikir yang menggunakan konsep partisipasi yang diutarakan oleh Fung (2006). Peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam penurunan *stunting* di Desa Tonasa Kabupaten Takalar.

Teori Fung memuat tiga dimensi penting dari partisipasi yakni *participant selection, communication and decision making, dan authority and power*.

Gambar 6.1.1 Kerangka Pikir

